



# **RENCANA AKSI KINERJA SASARAN**

**TAHUN 2025**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dapat tersusun tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Rencana Aksi Kinerja disusun sebagai dasar untuk mengevaluasi sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Tasikmalaya, Januari 2025  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Tasikmalaya



**Drs. RONI A. SAHRONI, M.M**  
NIP. 19681008 198803 1 003

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	3
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	3
<b>1.2 Maksud dan Tujuan .....</b>	3
<b>1.3 Sistematika Penulisan .....</b>	4
<b>BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	5
<b>2.1 Rencana Kerja (RENJA).....</b>	5
<b>2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....</b>	5
<b>2.3 Perjanjian Kinerja.....</b>	9
<b>BAB III RENCANA AKSI.....</b>	12
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	20

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam melaksanakan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2025.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan dokumen rencana aksi

kinerja sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2025 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran startegis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mempermudah dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2025;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi.

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan doumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebagai berikut:

<b>Bab I Pendahuluan</b>	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
<b>Bab II Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja</b>	Menyajikan mengenai Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
<b>Bab III Rencana Aksi</b>	Menyajikan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
<b>Bab IV Penutup</b>	Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi.

## BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Kerja (RENJA)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur penunjang pengelola keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah “**Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima**”. BPKPD memiliki tugas yang strategis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati, untuk menunjang tujuan strategis tersebut maka disusunlah sasaran strategis agar tujuan tersebut tercapai.

### 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 sesuai dengan periode Renstra yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 100.1.6/KEP.17/BPKPD/2025

tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR.10.06/ Kep.60/ BPKPD/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

**RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025**

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama**

**Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja							Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						
					2020	2021	2022	2023	2025	2025	2026					2020	2021	2022	2023	2025	2025	2026
I	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	59,06	66,489	67,50	78,01	79,00	80,00	81,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	65	69	78,25	87,60	87,75		
							9				Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel				%	100	100	100	100	100	100	

## RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

										Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74	77	80	83	86	83,49	84,04
										Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	51,16	5,05

*Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026*

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja (PK)**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	87,60
2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
3.	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	83,49%
4.	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	51,16%

**Tabel 2.3**

**Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis  
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	87,60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		38.816.554.467,00
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.000.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.126.913.147,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	482.425.800,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.438.801.037,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	424.801.200,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.838.950.000,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.271.663.283,00
2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		704.787.153.003,00
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.662.640.000,00
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	531.261.000,00
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	709.300.000,00

## RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	700.883.952.003,00
3.	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	83,49%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.773.202.000,00
4.	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	51,16%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.769.099.844,00

Sumber: BPKPD 2025, diolah

### **BAB III RENCANA AKSI**

Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dituangkan secara berkala. Adapun rencana aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

### RENCANA AKSI KINERJA SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEGIATAN	TARGET BULAN KE-												ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Nilai Reformasi Birokrasi	87,60	-	-	-	87,60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		83									83					32.359.913.147,00	SEKRETARIAT
								Meningkatkan Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah		87,00													87,00	6.456.641.320,00	SEKRETARIAT
							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	106	13	6	7	12	5	4	12	7	2	18	3	17	233.000.000,00	SEKRETARIAT	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	33	8	4	3	0	2	2	2	4	0	7	0	1	173.000.000,00	SEKRETARIAT	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	73	5	2	4	12	3	2	10	3	2	11	3	16	60.000.000,00	SEKRETARIAT	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persen	100	7,1 4	7,1 4	14, 29	7,1 4	7,1 4	14, 29	7,1 4	7,1 4	7,1 4	7,1 4	7,1 4	7,1 4	32.126.913.147,00	SEKRETARIAT	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	97	97	97	194	97	97	194	97	97	97	97	97	97	32.126.913.147,00	SEKRETARIAT	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Kapasitas ASN BPKPD	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Persen	100	0,0 0	48, 34	25, 00	0,0 0	0,9 9	0,0 0	25, 00	0,0 0	0,6 6	0,0 0	0,0 0	0,0 0	482.425.800,00	SEKRETARIAT	
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Menyediakan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	87.425.800,00	SEKRETARIAT	
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Bimbingan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	151	0	146	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	395.000.000,00	SEKRETARIAT	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100	0,0 0	11, 11	27, 78	0,0 0	0,0 0	16, 67	0,0 0	0,0 0	16, 67	0,0 0	0,0 0	27, 78	2.438.801.037,00	SEKRETARIAT	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	40.750.000,00	SEKRETARIAT	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.043.340,00	SEKRETARIAT	

## RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	60.915.967,00	SEKRETARIAT
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	150.000.000,00	SEKRETARIAT
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000.000,00	SEKRETARIAT
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	62.000.000,00	SEKRETARIAT
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	180.000.000,00	SEKRETARIAT
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	737.532.730,00	SEKRETARIAT
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Melaksanakan penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	82.559.000,00	SEKRETARIAT
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Persen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424.801.200,00	SEKRETARIAT
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Menyediakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424.801.200,00	SEKRETARIAT
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	38,89	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	1.838.950.000,00	SEKRETARIAT
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.099.750.000,00	SEKRETARIAT
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000.000,00	SEKRETARIAT
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	651.200.000,00	SEKRETARIAT
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan pemenuhan jasa pemeliharaan barang milik daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	1.271.663.283,00	SEKRETARIAT
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melaksanakan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	70	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	799.990.000,00	SEKRETARIAT
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	282.748.483,00	SEKRETARIAT

## RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	188.924.800,00	SEKRETARIAT		
	2	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	15, 74%	17, 59 %	17, 59 %	49, 07 %	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	5,9 9	8,8 5	3,8 5	8,2 5	3,8 5	2,2 0	7,5 6	11, 29	6,6 2	6,5 0	8,5 0	26, 54	704.787.153.003,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Menyelenggarakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persen	100	9,0 9	7,5 4	1,8 2	1,8 2	1,8 2	0,0 0	0,0 0	36, 36	3,3 7	9,0 9	10, 91	18, 18	2.662.640.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	85.000.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	85.000.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	80.000.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	80.000.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.500.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.000.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	169.800.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	169.800.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	5	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	728.770.000,00	BIDANG ANGGARAN	

## RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

					Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	647.394.000,00	BIDANG ANGGARAN
					Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	318	0	200	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	468.376.000,00	BIDANG ANGGARAN
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Menyelenggarakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	100	10, 42	4,1 7	4,1 7	10, 42	4,1 7	4,1 7	22, 92	4,1 7	4,1 7	10, 42	4,1 7	16, 67	531.261.000,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Melaksanakan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	236	59	0	0	59	0	0	59	0	0	59	0	0	52.050.000,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN
					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	220.000.000,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN
					Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	119.211.000,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Melaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	140.000.000,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Menyelenggarakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen	100	1,6 8	20, 91	6,6 2	18, 01	6,6 2	1,8 6	4,5 6	1,8 6	16, 15	3,7 2	16, 15	1,8 6	709.300.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	14	0	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	150.000.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Laporan	17	2	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	105.900.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Laporan	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	161.300.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

## RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	126.400.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	
						Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Menyusun Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	65.700.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	41	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Menyelenggarakan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	2,7 8	2,7 8	2,7 8	2,7 8	2,7 8	2,7 8	2,7 8	2,7 8	2,7 8	2,7 8	2,7 8	69, 44	700.883.952.003,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN	
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Melaksanakan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	651.893.740.000,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN	
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Melaksanakan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.015.440.000,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN	
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18.974.772.003,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN	
Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	3	Percentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	83, 49 %	-	-	-	83, 49 %	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Persen	83,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83, 49	1.773.202.000,00	BIDANG ASET DAERAH
						Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	2,0 8	2,0 8	2,0 8	14, 58	27, 08	2,0 8	14, 58	2,0 8	2,0 8	2,0 8	2,0 8	27, 08	1.773.202.000,00	BIDANG ASET DAERAH	
						Penyusunan Standar Harga	Menyusun Standar Harga Tahun 2026 dan Standar Harga Perubahan Tahun 2024	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	105.165.000,00	BIDANG ASET DAERAH	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21.688.000,00	BIDANG ASET DAERAH	
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Laporan	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.250.100.000,00	BIDANG ASET DAERAH	

# RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Melaksanakan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	396.249.000,00	BIDANG ASET DAERAH	
Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	4	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	51,16 %	-	-	51,16 %	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100%	5,28	5,71	3,99	8,58	3,99	3,56	18,21	3,13	13,54	5,21	4,85	23,96	6.769.099.844,00
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100	5,28	5,71	3,99	8,58	3,99	3,56	18,21	3,13	13,54	5,21	4,85	23,96	6.769.099.844,00	
						Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Menyusun Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	256.460.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Melaksanakan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	347.359.844,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	118.109.500,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	29	5	6	2	3	2	1	6	0	0	0	4	0	2.092.425.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
						Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	Laporan	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	859.495.500,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Melaksanakan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	376.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.400	505.480.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Melaksanakan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	1	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1.212.007.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Melaksanakan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	81.681.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
						Penagihan Pajak Daerah	Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	838.970.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah

## RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Melaksanakan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	457.112.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
<b>JUMLAH</b>																		<b>752.146.009.314,00</b>							

## BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat megantisipasi adanya permasalahan/faktor penghambat yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Tasikmalaya, Januari 2025  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



**Drs. RONI A. SAHRONI, M.M**  
NIP. 19681008 198803 1 003